

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai strategi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pada hasil pembahasan mengenai strategi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan merupakan kombinasi antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, serta pembentukan kelembagaan seperti SULD yang menjadi dasar penguatan layanan disabilitas di tingkat universitas. Sementara itu, pendekatan *bottom-up* terlihat dari keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta volunteer dalam pelaksanaan layanan dan penciptaan lingkungan kampus yang inklusif. Kombinasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan akomodasi yang layak tidak hanya bersifat kebijakan struktural, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika agar implementasi dapat berjalan lebih efektif.

A. Formulasi Strategi

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur telah memiliki dasar formulasi strategi yang kuat melalui perumusan nilai lembaga, analisis kondisi internal dan eksternal, serta perumusan visi dan misi yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Nilai lembaga yang dimiliki oleh

UPN “Veteran” Jawa Timur berupa nilai Bela Negara yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga diimplementasikan dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik sehingga dapat membentuk budaya organisasi dan identitas institusi. Selain itu, universitas juga telah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal melalui evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta penggunaan analisis SWOT yang melibatkan pihak internal dan eksternal, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi yang dirumuskan melalui forum rapat dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga, Visi dan misi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif tapi juga relevan dengan kondisi dan tantangan ke depan.

B. Implementasi Strategi

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UPN “Veteran” Jawa Timur telah memiliki kebijakan dan strategi inklusivitas yang cukup jelas yang tercantum dalam berbagai dokumen, yaitu Renstra, Peraturan Rektor, pembentukan SULD, serta Pedoman Layanan Akademik. Pada aspek kurikulum, universitas telah memodifikasi kurikulum dengan menggunakan pendekatan *Universal Design for Learning*. Namun, dalam implementasinya belum semua tenaga pendidik menerapkan pendekatan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya arahan dari universitas serta belum meratanya pelaksanaan pembelajaran inklusif akibat lemahnya koordinasi dan sistem informasi yang membuat dosen tidak selalu mengetahui keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas.

Dari aspek sarana dan prasarana, UPN “Veteran” Jawa Timur telah menyediakan fasilitas umum di setiap gedung, namun masih diperlukan monitoring terhadap kualitas serta kelengkapan fasilitas yang ada. Dari aspek pembentukan SULD, beberapa program yang dilaksanakan SULD masih menghadapi kendala karena program SULD yang masih berfokus pada penguatan internal sehingga kolaborasi eksternal belum maksimal, sistem pendataan yang belum terintegrasi dan tidak konsisten serta kurangnya tindak lanjut setelah pendataan menyebabkan data belum merepresentasikan kondisi riil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun secara kebijakan dan perencanaan sudah cukup baik namun implementasi inklusivitas di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi, sistem informasi, dan efektivitas program.

C. Evaluasi Strategi

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran, analisis kinerja, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pada SULD UPN “Veteran” Jawa Timur telah dilakukan secara sistematis melalui beberapa level evaluasi. Evaluasi program dilaksanakan setiap kegiatan selesai sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan, sedangkan evaluasi volunteer dan kelembagaan dilakukan secara periodik di akhir semester, termasuk melalui monitoring dan evaluasi oleh LPMPP sebagai pihak eksternal. Selain itu, SULD juga melakukan evaluasi berbasis umpan balik penerima layanan, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum menjangkau seluruh mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan merupakan kombinasi antara evaluasi formatif dan sumatif, di mana evaluasi per program bersifat formatif dan

evaluasi akhir periode bersifat sumatif. Dalam aspek pelaporan, SULD menyusun laporan kegiatan yang disampaikan kepada LPMPP serta kementerian, khususnya dalam program hibah, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan 193 pemenuhan kewajiban regulatif sesuai Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Secara keseluruhan, sistem yang ada telah mencerminkan prinsip akuntabilitas, namun masih terdapat kelemahan pada aspek evaluasi partisipatif dan ketergantungan terhadap evaluasi eksternal, sehingga diperlukan penguatan evaluasi internal agar lebih mandiri dan komprehensif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memnerikan beberapa saran dibawah ini:

1. Universitas perlu memperkuat sistem penyebaran informasi terkait layanan disabilitas dan pembelajaran inklusif. Masih terdapat dosen yang belum mengetahui keberadaan pedoman layanan disabilitas maupun referensi penyesuaian pembelajaran bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelaksanaan pembelajaran inklusif berjalan tidak optimal karena dosen belum memiliki acuan layanan yang jelas dan mudah diakses. Sehingga, universitas perlu mengembangkan platform informasi terintegrasi berbasis digital yang memuat pedoman layanan disabilitas, panduan pembelajaran inklusif, serta informasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh dosen.
2. Untuk mengatasi hambatan pendataan mahasiswa penyandang disabilitas yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem pendataan, keterlibatan program studi

yang masih terbatas, serta adanya mahasiswa yang belum memahami atau belum bersedia mengungkapkan kondisi disabilitasnya, peneliti menyarankan penguatan koordinasi dan kolaborasi antara SULD dengan unit di lingkungan universitas, pengintegrasian sistem pendataan dengan akademik kampus, serta sosialisasi inklusivitas, layanan, program, dan benefit yang didapatkan mahasiswa penyandang disabilitas ketika melakukan pendataan di SULD.

3. Mengembangkan layanan berbasis kebutuhan (asesmen individu, pendampingan akademik, layanan terpadu) dengan memberikan tindak lanjut setelah proses pendataan kepada mahasiswa penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan kapasitas dosen dan awareness civitas akademika, serta menyusun program yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak langsung untuk mendukung kampus inklusif.
4. Masih terdapat sarana dan prasarana di lingkungan kampus yang belum sepenuhnya aman dan ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya jalur pemandu jalan (*guiding block*) yang memadai, kondisi jalan yang tidak rata, permukaan bidang miring yang licin saat hujan, serta beberapa fasilitas seperti ramp dan pegangan yang masih kurang kokoh. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas serta menimbulkan risiko keselamatan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam beraktivitas di lingkungan kampus. Sehingga, universitas perlu memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana aksesibilitas benar-benar aman digunakan melalui penguatan standar keamanan fasilitas serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.